

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG



PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk tahun 2024.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Perubahan Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Belitung.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Tanjungpandan, 22 Agustus 2024

INSPEKTUR KABUPATEN BELITUNG



[Handwritten signature]
PARYANTA, S.Pd, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196701281989031003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	13
BAB IV PENUTUP.....	16
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

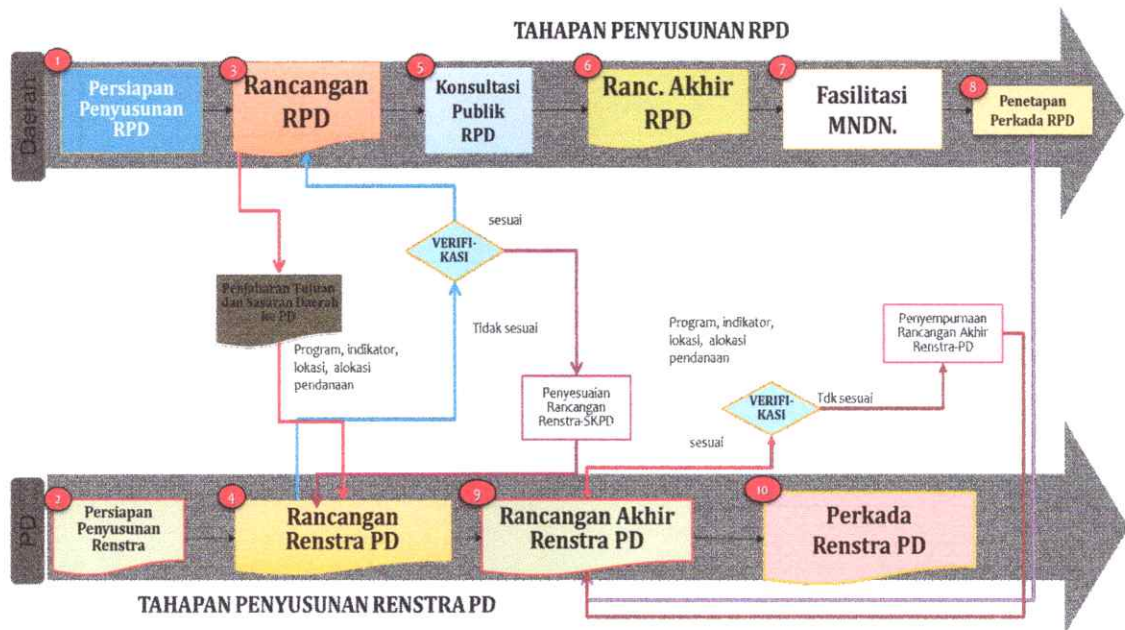
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Perubahan Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Belitung dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-

RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Perubahan Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 46).
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk:

1. Menselaraskan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD Tahun 2024
2. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan Pelayanananan
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2024, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2024 telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14= 6 + 12		15= 14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan yang efektif dan efisien																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100.00	-	100.00	8,614,168,379	100	10,764,393,140		2,386,349,140		3,349,381,589		-	-	100	5,735,730,729	100.00 %	53.28%	100.00	14,349,899,108		0.00%		Inspektorat	
			Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	86.70		86.14		86.7											0.00%		86.70						
			Persentase pelayanan administrasi perkanbrabren perangkat daerah (persen)	100.00		100.00		100									100		100.00 %		100.00						
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100.00		100.00		100									100		100.00 %		100.00						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		-	0.00	-	10	9,349,100		-		-		-	-			0.00%	0.00%	0.00			0.00%	0.00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		-	0.00	-	3	3,000,000		-		1		-		1		33.33%	0.00%	1.00			0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		-	0.00	-	1	1,199,800		-		-		-		-		0.00%	0.00%	0.00			0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		-	0.00	-	1	1,199,800		-		-		-		-		0.00%	0.00%	0.00			0.00%	0.00%		

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		-	0.00	1	1,449,900	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		-	0.00	1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		-	0.00	3	1,499,600	-	-	2	-	2	-	-	66.67%	0.00%	2.00	-	0.00%	0.00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)		-	0.00	3	8,318,780,274	8,535,731,800	-	2,155,845,926	-	2,643,162,718	-	-	4,799,008,644	0.00%	56.22%	0.00	13,117,788,918	0.00%	0.00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0.00	40	8,318,780,274	8,532,232,000	-	2,155,845,926	40	2,642,710,718	-	40	4,798,556,644	100.00%	56.24%	40.00	13,117,336,918	0.00%	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		-	0.00	1	2,000,000	-	-	-	452,000	-	-	452,000	0.00%	22.60%	0.00	452,000	0.00%	0.00%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		-	0.00	2	1,499,800	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Orang)		-	0.00	40	295,388,105	526,345,000	-	36,029,657	-	108,733,616	-	-	144,763,273	0.00%	27.50%	0.00	440,151,378	0.00%	0.00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)		-	0.00	1	23,400,000	-	-	1	-	-	1	-	100.00%	0.00%	1.00	-	0.00%	0.00%	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		-	0.00	1	2,526,750	2,950,000	-	550,000	-	300,000	-	-	850,000	0.00%	28.81%	0.00	3,376,750	0.00%	0.00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		-	0.00	40	292,861,355	499,995,000	3	35,479,657	18	108,433,616	-	21	143,913,273	52.50%	28.78%	21.00	436,774,628	0.00%	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya administrasi umum Perangkat Daerah (Persen)		-	0.00	1	577,945,440	-	128,752,529	-	139,397,471	-	-	268,150,000	0.00%	46.40%	0.00	268,150,000	0.00%	0.00%	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	1	6,000,000	-	540,000	-	-	-	-	540,000	0.00%	9.00%	0.00	540,000	0.00%	0.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	2	49,967,820	-	340,000	-	5,892,000	-	-	6,232,000	0.00%	12.47%	0.00	6,232,000	0.00%	0.00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	1	20,000,000	-	2,510,000	-	-	-	-	2,510,000	0.00%	12.55%	0.00	2,510,000	0.00%	0.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	2	169,990,620	-	19,856,000	-	30,836,000	-	-	50,692,000	0.00%	29.82%	0.00	50,692,000	0.00%	0.00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	0.00	-	1	14,987,000	-	610,000	-	-	-	-	610,000	0.00%	4.07%	0.00	610,000	0.00%	0.00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		-	0.00	-	1	12,000,000	-	710,000	1	2,732,500	-	1	3,442,500	100.00%	28.69%	1.00	3,442,500	0.00%	0.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0.00	-	12	305,000,000	3	104,186,529	3	99,936,971	-	6	204,123,500	50.00%	66.93%	6.00	204,123,500	0.00%	0.00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang milik daerah (Jenis)		-	0.00	-	3	499,584,000	-	-	-	290,000,000	-	-	290,000,000	0.00%	58.05%	0.00	290,000,000	0.00%	0.00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	1	303,500,000	-	-	1	290,000,000	-	1	290,000,000	100.00%	95.55%	1.00	290,000,000	0.00%	0.00%
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	71	149,908,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0.00	-	3	46,176,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran (Persen)		-	0.00	-	1	285,467,800	-	27,726,678	-	87,517,284	-	-	115,243,962	0.00%	40.37%	0.00	115,243,962	0.00%	0.00%

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0.00	-	12	2,000,000	3	300,000	3	-			6	300,000	50.00%	15.00%	6.00	300,000	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0.00	-	12	150,000,000	3	27,426,678	3	32,220,284			6	59,646,962	50.00%	39.76%	6.00	59,646,962	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0.00	-	12	133,467,800	-	-	6	55,297,000			6	55,297,000	50.00%	41.43%	6.00	55,297,000	0.00%	0.00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik (Jenis)		-	0.00	-	4	329,970,000	-	37,994,350	-	80,570,500			-	118,564,850	0.00%	35.93%	0.00	118,564,850	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0.00	-	24	97,000,000	-	-	14	18,694,500			14	18,694,500	58.33%	19.27%	14.00	18,694,500	0.00%	0.00%	
	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		-	0.00	-	2	3,000,000	-	-	-	-			-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0.00	-	105	29,970,000	15	6,545,850	2	1,750,000			17	8,296,850	16.19%	27.68%	17.00	8,296,850	0.00%	0.00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0.00	-	2	200,000,000	-	31,448,500	1	60,126,000			1	91,574,500	50.00%	45.79%	1.00	91,574,500	0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	89.11%	53.28%					
Predikat Kinerja																	Tinggi	Rendah					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut toman hasil pengawasan/pemeriksaan (Persen)	90.00	-	0.00	55,711,808	90	364,839,200		5,439,000		55,170,101			-	60,609,101	0.00%	16.61%	90.00	116,320,909	0.00%	0.00%	Inspektoral
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan penyelenggaraan pengawasan internal berdasarkan PKPT (Laporan)		-	0.00	55,711,808	223	239,839,200	-	5,439,000	-	50,138,601			-	55,577,601	0.00%	23.17%	0.00	111,289,409	0.00%	0.00%	
		Laporan penyelenggaraan pengawasan internal ()			0.00		0										0.00%		0.00		0.00%		

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		-	0.00		3	9,872,500	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Pendampingan dan Asistensi	Laporan pelaksanaan pendampingan dan asistensi (Laporan)		-	0.00		24	389,965,800	-	5,529,700	-	37,564,612	-	-	43,094,312	0.00%	11.05%	0.00	43,094,312	0.00%	0.00%
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)		-	0.00		7	49,996,500	-	-	4	2,700,000		4	2,700,000	57.14%	5.40%	4.00	2,700,000	0.00%	0.00%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)		-	0.00		10	80,000,000	-	-	2	-		2	-	20.00%	0.00%	2.00	-	0.00%	0.00%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)		-	0.00		6	249,977,300	-	5,529,700	-	34,864,612		-	40,394,312	0.00%	16.16%	0.00	40,394,312	0.00%	0.00%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)		-	0.00		1	9,992,000	-	-	-	-		-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	11.15%	10.78%			
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
								11,529,070,640								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	84.17%	50.65%			
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Tinggi	Rendah			

**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
Triwulan II Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Belitung**

No	Program	Persentase Rata-Rata Capaian Program PD (%) / Predikat			
		Persentase Kinerja	Predikat	Persentase Keuangan	Predikat
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	89.11%	Tinggi	53.28%	Rendah
2	Penyelenggaraan Pengawasan	18.40%	Sangat Rendah	16.61%	Sangat Rendah
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	11.15%	Sangat Rendah	10.78%	Sangat Rendah
	Rata-Rata Capaian Kinerja	84.17%	Tinggi	50.65%	Rendah

Keterangan Predikat:

- SR : Sangat Rendah ($\leq 50\%$)
- R : Rendah ($51\% \leq 65\%$)
- S : Sedang ($66\% \leq 75\%$)
- T : Tinggi ($76\% \leq 90\%$)
- ST : Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Belitung pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 84.17% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 50.65%. Berdasarkan capaian tersebut, maka predikat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Belitung pada Triwulan II Tahun 2024 adalah Tinggi (T), dan untuk predikat penyerapan anggaran Inspektorat Kabupaten Belitung adalah Rendah (SR).

Persentase capaian kinerja dan keuangan tersebut merupakan perhitungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dari seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Juni Tahun 2024.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Belitung dalam upaya pencapaian target kinerja pada Perubahan Renja tahun 2024 menetapkan 3 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 11 Kegiatan dan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 42 sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari kegiatan:
 - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Kegiatan Administrasi Keuangan, meliputi sub kegiatan:
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah
 - 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Mebel
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari kegiatan:

- A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, meliputi sub kegiatan:
1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 3. Reviu Laporan Kinerja
 4. Reviu Laporan Keuangan
 5. Pengawasan Desa
 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

B. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi sub kegiatan:

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari kegiatan:

A. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, meliputi sub kegiatan:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

B. Asistensi dan Pendampingan, meliputi sub kegiatan:

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Asistensi dan Pendampingan
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Seluruh program dan kegiatan di atas diharapkan mendukung Visi dan Misi Bupati Periode 2024-2026.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Tahun 2024 beserta perubahannya dan Prakiraan Maju 2025 (terlampir) :

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini disusun dengan harapan pencapaiannya sesuai dengan target kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024. Dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya, baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Belitung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2024. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, kemauan, semangat dan keseriusan segenap aparat Inspektorat Kabupaten Belitung.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil atau tidak akan mempunyai arti dan manfaat khususnya bagi kepentingan pemerintah daerah, serta masyarakat Kabupaten Belitung pada umumnya.

Tanjungpandan, 22 Agustus 2024

INSPEKTUR KABUPATEN BELITUNG



PARYANTA, S.Pd, S.IP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196701281989031003

**REVISI RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENIA OPD)
INSPEKTORAT KAL. BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Kode	Uraian / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2023	Praktikan Tahun 2023	Target 2024		Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Praktikan Mula, Rencana Tahun 2025	Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
							Sebelum	Setelah	RPMD 2024	APBD 2024	RPMD Perubahan 2024	Nasional			Daerah	Target				Pagu Indikatif (Rp)
1		Inspektoral							11.451.272.340,00	11.529.070.640,00	12.486.865.880,00							13.831.300.000,00		
6	01	INSPEKTORAT DAERAH							11.451.272.340,00	11.529.070.640,00	12.486.865.880,00							13.831.300.000,00		
6	01	INSPEKTORAT DAERAH							11.451.272.340,00	11.529.070.640,00	12.486.865.880,00							13.831.300.000,00		
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presertasi dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan kepatuhan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Peningkat Daerah						10.686.559.540,00	10.764.393.140,00	11.776.315.130,00							12.900.800.000,00		
6	01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						10 Dokumen	10 Dokumen	9.349.100,00							10.900.000,00		
6	01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00							3.500.000,00		
6	01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS/SPRD							1 Dokumen	1 Dokumen	1.199.800,00							1.500.000,00		
6	01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS/SPRD							1 Dokumen	1 Dokumen	1.199.800,00							1.500.000,00		
6	01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA/SPPD							1 Dokumen	1 Dokumen	1.449.900,00							1.500.000,00		
6	01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA/SPRD							1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1.200.000,00		
6	01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3 Laporan	3 Laporan	1.499.600,00							1.700.000,00		

6	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.535.731.800,00	8.535.731.800,00	8.535.731.800,00	Pengajuan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	10.835.900.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.02	0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	8.532.232.000,00	8.532.232.000,00	9.308.232.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajenean	45 Orang/bulan	10.831.700.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajenean	1 Laporan	2.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajenean	2 Dokumen	1.700.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.05	Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenjhiya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	40 Orang	526.345.000,00	526.345.000,00	526.345.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajenean	45 Orang	583.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.05	0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajenean	1 Paket	30.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajenean	1 Dokumen	3.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang	499.995.000,00	499.995.000,00	560.350.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajenean	41 Orang	550.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenjhiya administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	577.945.440,00	577.945.440,00	577.945.440,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajenean	Aparatur 100 %	632.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.06	0001	Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajenean	1 Paket	7.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.06	0002	Penyelesaian Perawatan dan Perengkapan Kantor	2 Paket	49.967.820,00	49.967.820,00	49.967.820,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajenean	2 Paket	55.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.06	0003	Penyelesaian Perabotan Rumah Tangga	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	12.275.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkajenean	1 Paket	25.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	2.06	0004	Penyelesaian Bahan Logistik Kantor								

6	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	4 Jenis	329.970.000,00	329.970.000,00	329.970.000,00	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	4 jenis	276.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	2	09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
6	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	97.000.000,00	97.000.000,00	126.740.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	26 Unit	110.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	6.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	2	09	0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	29.970.000,00	29.970.000,00	31.390.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	114 Unit	40.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	120.000.000,00	INSPEKTORAT	
2	6	01	02	PROGRAM PENLENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70 %	364.851.500,00	364.839.200,00	380.424.450,00	80%			520.500.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	2	01	Penyenggaraan Pengawasan Internal	Laporan penyelenggaraan pengawasan Internal	223 Laporan	239.851.500,00	239.839.200,00	239.839.200,00	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur	223 Laporan	385.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2	01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	52.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2	01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	77 Laporan	34.895.000,00	34.895.000,00	47.695.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	77 Laporan	78.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2	01	0003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	53 Laporan	9.991.800,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53 Laporan	12.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2	01	0004	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	77 Laporan	59.974.200,00	59.974.200,00	58.398.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	77 Laporan	52.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2	01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	13 Laporan	34.990.500,00	34.980.000,00	31.485.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Laporan	85.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2	01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APD									

